

STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PETAHANAN PASANGAN HJ. AIRIN RACHMI DIANY DAN BENYAMIN DAVNIE PADA PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015

Yuniazma Zeliana^{1*}, Endang Sulastr¹, Sumarno¹, Lusi Andriyani¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH.Ahmad Dahlan Cirende, Jakarta

*E-mail: linzeliana.lz@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai calon petahana yang kembali bertarung dalam pemilu tentu sudah memiliki modal utama yaitu kedekatan dengan masyarakat dan birokrat, namun tidak semua calon petahana bisa kembali menduduki kursinya. Calon Petahan Airin-Benyamin yang kerap diterpa dengan isu-isu negatif mengenai dirinya dalam pelaksanaan pilkada di Kota Tangerang Selatan, mulai dari isu Dinasti politik, korupsi Wawan yang merupakan suami dari Arin, sampai isu kegagalan dalam pemerintahannya. Namun dengan berbagai isu tersebut, Airin-Benyamin mampu untuk memenangkan kembali pertarungan dalam pilkada. Strategi politik apakah yang dilakukan dalam pemenangan calon petahana Airin-benyamin dalam pilkada Kota Tangerang Selatan 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskripsi analisis dan metode triangulasi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Timses, Perwakilan partai pengusung, Birokrat TRUTH dan Panwaslu Kota Tangerang Selatan, serta dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Teori Kekuatan-kekuatan Politik. Penelitian ini menghasilkan sebuah fakta bahwa dalam Strategi politik pemenangan pasangan calon petahana Airin-Benyamin menggunakan strategi pemenangan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan politik dari atas hingga akar rumpun yang memiliki power dan basis masa yang sangat kuat, serta memanfaatkan kekuatan politik Dinasti Ratu Atut yang telah dirawat dengan baik dari sejak pemenangan Atut dan merencanakan strategi politik dengan begitu tersuktur untuk pemenangan.

Kata kunci: Pilkada, Tangsel 2015, Strategi, Petahana

ABSTRACT

As an incumbent candidate who returns to contest the election, of course, he already has the main capital, namely closeness to the public and bureaucrats, but not all incumbent candidates can return to their seats. Candidates for Petahan Airin-Benyamin who are often hit by negative issues regarding him in the implementation of the regional elections in South Tangerang City, ranging from issues of political dynasty, corruption of Wawan who is Arin's husband, to issues of failure in his government. But with these various issues, Airin-Benyamin was able to win back the battle in the regional elections. What political strategy was carried out in winning the incumbent Airin-benyamin candidate in the 2015 South Tangerang City elections. The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques through in-depth interviews with Timses, representatives of the supporting parties, TRUTH bureaucrats and South Tangerang City Supervisory Committee, as well as by using documentation techniques. The theory used is the Theory of Political Forces. This research resulted in the fact that in the political strategy of winning the incumbent candidate pair Airin-Benyamin used a winning strategy by using political strengths from above to the roots of clumps that had very strong power and mass bases, and took advantage of the political power of the Ratu Atut Dynasty that had been treated. Well since Atut's victory and planning a political strategy in a structured manner for the win.

Keywords: Pilkada, Tangsel 2015, Strategy, Incumbent

PENDAHULUAN

Pemilu dalam negara demokrasi merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Perkembangan secara signifikan terjadi dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan momentum politik dan “sejarah masa depan” demokrasi Indonesia. Hal yang menarik dalam perhelatan demokrasi saat ini adalah dengan maraknya calon petahana (*Incumbent*) diberbagai daerah yang kembali ikut bertarung diperhelatan pemilihan selanjutnya. Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan dari 538 calon kepala dan calon wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak 2015, 278 orang atau lebih dari separuh di antara mereka merupakan mantan gubernur, bupati dan wali kota ataupun wakilnya (BBC News, 2018).

Berdasarkan data yang dipublikasikan di situs web KPU, sejumlah daerah yang diikuti oleh calon kepala daerah yang berasal dari pasangan kepala daerah petahana ataupun kepala daerah dan wakilnya yang bersaing di daerah yang sama berjumlah 103 kepala daerah dan wakil petahana yang bertarung kembali. Beberapa daftar kepala daerah ataupun wakil kepala daerah petahana yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2015 adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Jembrana, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten

Gorontalo, dan lain-lain (infopilkada.kpu.go.id, 2018).

Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim MS mengatakan bahwa pada pilkada tahun 2015 Hasil pemilihan tersebut mayoritas calon petahana ini kembali menduduki kursinya (Carlos KY Paath, 2016). Kesuksesan pasangan kandidat petahana merupakan fenomena terkini yang terjadi dalam era pesta demokrasi lokal di berbagai daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota se-Indonesia.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu daerah otonom yang telah melakukan dua kali pilkada langsung yaitu pada tahun 2010 dan 2015. Pilkada Tangerang Selatan 2015 terdapat 3 pasangan calon, Pasangan Arin-Benyamin yang kembali maju begitu pula Arsid dengan mengandeng Elvier.

Pilkada dimenangkan oleh Pasangan Calon Arin-Benyamin yang didukung oleh koalisi partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sosioal (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Sebagai Calon Petahana Airin memiliki peluang lebih besar dari pada kandidat lainnya karena ia akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan birokrat dan juga lebih mudah untuk membangun citra positifnya ditengah masyarakat. Namun tidak bisa juga dipungkiri sebagai calon petahana Airin juga kerap diterpa dengan isu-isu negatif mengenai dirinya dan keluarga, mulai dari status tersangka korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada suami Airin Rachmi Diany yaitu Tb Chaeri Wardhana alias Wawan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) kedokteran umum di Puskesmas Tangsel Tahun 2012 (www.kpk.go.id).

Kemiskinan dan pendidikan rendah dimasa pemerintahannya, demikian dengan isu tentang pelaksanaan pilkada pada tahun 2010 yang sempat diulang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) diduga adanya bukti kecurangan pengerahan birokrasi secara struktural, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Airin dan Benyamin. Isu dan propaganda yang dibuat oleh lawan

politiknya membuat citra kandidat Airin-Benyamin pada saat itu sempat menurun, Hal ini diungkapkan oleh Ade Yunus selaku Direktur lembaga kajian dan Analisa Daerah (LKADK), bahwasanya sebelum Airin diterpa isu korupsi dan rezim Dinasti tingkat elektabilitasnya 41% sedangkan sesudah diterpa isu elektabilitasnya menjadi 37,17 % (Joniansyah Haryono, 2017) .

Merosotnya angka elektabilitas tersebut mau tidak mau menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan Airin-Benyamin. Dengan berbagai isu yang menerpa sebagaimana di atas Airin-Benyamin mampu untuk memenangkan kembali pertarungan dalam Pilkada 2015. Hal ini tentu membutuhkan strategi politik yang tepat dan efektif. Penelitian ini menarik untuk mengkaji bagaimana strategi politik yang digunakan Airin-Benyamin sebagai petahana yang diterpa isu-isu negatif.

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Teori kekuatan politiklah yang kemudian mendukung dalam menjabarkan lebih jauh mengenai Strategi politik kemenangan Petahana.

Dalam menghadapi pilkada banyak faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang - orang yang akan menjalankan fungsi - fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga - lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik.

Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya. Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Agar

memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan (Fahmid, 2012 :28). Jenis - jenis kekuatan politik yang memiliki andil dalam mensukseskan pilkada diantaranya (Asrinaldi 2014 – 270) :

1. Partai Politik

Menurut Prof Miriam Budiardjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai partai politik atau setiap organisasi terkategori sebagai partai politik, apabila: *Pertama*, terwujud dalam identitas, dapat berupa nama, bendera dan yang terpenting ideologi yang menjadi dasar nilai bagi pedoman dan aktivitas partai politik; *Kedua*, ketika sekelompok orang-orang bergabung tentunya bukan sekedar kumpulan biasa, tetapi sebagai dalam sistem kepartaian Indonesia yang ada yaitu aliran nasionalis, aliran agama dan aliran politik lokal. ; *Ketiga*, keberadaan partai politik diakui memiliki hak oleh sebagian besar masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya, sekaligus mengembangkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Secara sederhana, partai politik bisa mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu yang merupakan pendukung atau anggota- anggotanya; *Keempat*, partai politik berupaya mengembangkan aktivitas-aktivitas melalui mekanisme kerja yang mencerminkan pilihan rakyat.

Partai politik dalam berbagai kegiatan, bekerja berdasarkan prinsip representative government atau pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat. Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan partai politik yang harus selalu berhubungan dengan rakyat. Dengan posisi seperti ini, partai politik diharuskan mengembangkan mekanisme hubungan yang aspiratif, responsif, dan partisipatif terhadap rakyat terutama pendukungnya sehingga apapun yang menjadi aktivitas politik partai merupakan gambaran

suara rakyat; Kelima, aktivitas inti partai politik adalah melakukan seleksi bagi rakyat, baik dari kalangan partai politik yang dipilih sebagai kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan (Surya, 2006:57).

2. Media Massa

Pengaruh politik terhadap kehidupan dan perkembangan pers/ media massa dapat terlihat pada citra pers, berdasarkan kepentingan yang dilayani. Pers yang melayani kepentingan politik, memperoleh citra sebagai pers politik. Menurut A.Muis, pers politik dapat dibagi paling sedikit dua tipe yaitu pers sebagai organ partai yang menyiarkan ideologi politik tertentu {Party-bound pers), dan simpatisan partai atau ideologi tertentu. Tipe pertama adalah pers yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak dan kebijakan partai, dan tipe kedua adalah pers yang tidak didominasi oleh partai melainkan hanya mendukung secara bebas suatu cita-cita politik.

Media massa memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat. Disatu sisi bisa menciptakan masyarakat hidup damai dan harmonis. Namun di sisi lain akibat pemberitaan media massa, suasana kehidupan kemasyarakatan bisa terjadi disharmonisasi bahkan bisa memunculkan huru-hara.

Dalam kaitan pemilihan umum kepala daerah, peran media massa juga begitu strategis. Media massa dan pilkada adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Media massa lewat wartawannya untuk meliput pilkada. Memberitakan tahapan-tahapan pilkada, meniup peluit peringatan jika ada indikasi pelanggaran. Media juga ikut memandu publik untuk menentukan pilihan kandidat pasangan calon kepala daerah yang terbaik. Karena fungsi dan perannya yang strategis itu pula, disadari atau tidak media massa sering dimanfaatkan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dengan alasan mensukseskan pilkada.

Setidaknya ada tiga jenis cara *Stakeholder* memanfaatkan media massa dalam kegiatan pilkada. *Pertama*, menjadikannya sebagai media komunikasi langsung dari pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini media massa dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah. Contoh gambar para pasangan calon kepala daerah dipampangkan di Koran. *Kedua*,

media massa dimanfaatkan sebagai sarana propaganda dan sarana informasi khusus. Dalam kasus ini, media massa dimanfaatkan *Stakeholder* untuk memberitakan tentang calon dan membangun citra positif terhadap pasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi pilkada, media penyebar informasi pendidikan untuk pemilih.

Informasi ini menyangkut partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan lain- lain. Kecenderungan memanfaatkan media massa dalam pilkada tidak saja dilakukan para calon atau tim sukses pasangan calon kepala daerah, tapi juga KPU dan Panwas sebagai penyelenggara pilkada. Para *Stakeholder* pilkada ini, selalu menjadikan media massa sebagai salah satu kekuatan terdepan untuk mewujudkan keinginannya.

3. Birokrasi

Sehubungan dengan pilkada yang tidak dapat dipungkiri akan selalu ada sorotan ataupun gunjingan akan keberadaan birokrasi yang dipresentasikan oleh para Pegawai Negeri Sipil. Sorotan utama adalah tentang netralitas atau keberpihakan para birokrat kepada calon peserta pilkada tertentu dalam tataran juridis formal sebenarnya netralitas PNS dalam pemilukada telah diatur seperti dalam PP no 6 tahun 2005 tentang netralitas PNS dalam Pilkada maupun Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang netralitas PNS dalam Pemilukada (Ishak, 2020).

Aturan yang ada tersebut tetap ada celah yang dapat dimanfaatkan karena beragamnya motif, model dan bentuk keberpihakan PNS terhadap kontestan pilkada yang ada, antara lain sentimen primordialisme dan logika kekuasaan yang dipengaruhi ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. Kekuatan dominan muncul dari kelompok jawara dan pemilik modal yang memiliki akses politik dengan pusat kekuasaan.

Reformasi politik ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap

professional, akan tetapi dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara mereka kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oleh sebab itulah kepala daerah terpilih dari partai politik memiliki kekuasaan yang sangat kuat (*powerfull authority*) untuk menarik PNS dalam politik praktis.

Pola hubungan *patron-client* serta politik balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah terkooptasi oleh kepentingan politik rezim tingkat lokal. Hal ini menyebabkan hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan.

4. Ormas Sebagai Kekuatan Politik

Salah satu fenomena yang menarik dicermati adalah peran dan sikap organisasi masyarakat (ormas) dalam pelaksanaan pilkada. Ormas seketika memiliki daya pikat yang luar biasa bagi pelaku politik praktis. Bagaimana tidak, ormas-ormas besar tentu memiliki sekian banyak anggota dan berpotensi untuk mendulang dukungan suara bagi pasangan calon kepala daerah. Selain itu, restu dari figur dan tokoh ormas kepada salah satu pihak politisi memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga fungsi-fungsi fundamental ormas bergandengan tangan dengan jalannya fungsi pengawasan oleh rakyat dalam pilkada.

Sikap Ormas dalam Pilkada, Berkaitan dengan pendidikan dan wawasan politik bagi masyarakat, Pahitarti menyatakan paling tidak ada empat kecendrungan sikap ormas dalam dinamika pilkada. Ini juga erat kaitannya dalam menentukan bagaimana model transformasi informasi, persepsi dan opini dari ormas kepada masyarakat.

Pertama, pimpinan ormas akan bersikap mendukung salah satu calon kepala daerah. Pada titik ini, ormas akan mengerahkan segenap sumber daya. Mulai dari menggalang atensi masa, mempengaruhi persepsi masyarakat, dan aneka negosiasi guna mensukseskan jagoannya.

Kedua, pimpinan ormas akan bersikap diam dan apatis dengan perkembangan politik di daerah. Sikap ini selanjutnya disebut apolitis. Apabila ormas mengambil sikap ini, maka ketidakberpihakan pada kubu politik manapun akan menjaga independensi dari kepentingan

politik jangka pendek. Kegiatan yang dilakukan sejatinya dalam rangka tujuan fundamental ormas. Disisi lain, terkadang dukungan politik dibutuhkan guna mempermudah pelaksanaan kegiatan ormas.

Ketiga, ormas dapat bersikap posisi ganda. Sikap ini mengahruskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai ormas yang tidak menolak pasangan calon tertentu, dan tidak secara tegas mendukung. Dalam posisi ini, ormas bisa berperan guna memperoleh keuntungan dari beberapa calon yang potensial.

Keempat, pimpinan ormas harus bersikap kritis dan kosnruktif. Ini berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Posisi ini mengharuskan ormas untuk bersikap jeli dan cermat dalam melihat jejak karir para calon. Sikap ini akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga bisa bermain pada level *hight politic* dan tidak terjebak pada kepentingan politik praktis.

Pada dasarnya apapun sikap yang diambil oleh ormas harus diniatkan bagi kepentingan dan kemajuan rakyat. Terlebih lagi, jika sikap tersebut niscaya melahirkan kemandirian pemilih yang berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Ormas harus dapat memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik untuk menyokong ke arah kemandirian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis. Menurut Corbin, yang dikutip oleh Sujarweni Wiratna, metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang tidak dapat dicapai dengan metode statistik (Wiratna, 2016:6).

Metode deskriptif-analisis sering di artikan sebagai metode penelitian yang fungsinya memberi gambaran tentang objek yang diteliti berdasarkan pengumpulan sampel sebagaimana adanya. Dengan kata lain, metode penelitian ini memusatkan masalah sebagaimana yang ada di lapangan, kemudian dianalisa dan untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:29). Metode penelitian deskriptif-analisis dipilih, karena metode ini sesuai dengan kondisi sumber data yang diolah dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu Informan ditetapkan secara sengaja untuk penelitian lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan-pertimbangan.

Adapun Informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pertama Bapak Suhardi yang merupakan salah seorang kader partai Golkar yang terlibat aktif dalam timsukses Airin-Benyamin selama dua priode pemenagan Airin-Benyamin. Informan Kedua Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Tarmizi yang merupakan ketua DPC PKB Tangerang Selatan, Informan ketiga penulis melakukan wawancara dengan perwakilan birokrat Bapak Rahmad Salam, Informan keempat dan kelima penulis melakukan wawancara dengan Kordinator TRUTH Aco Ardyansyah Adi P. dan divisi advokasi dan investigasi Jupry Nugroho, kedua informan dari TRUTH. Informan keenam PANWASLU Kota Tangerang Selatan Muhammad Acep selaku komisioner.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Perolehan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam akan diuji dan dianalisa kembali dengan data-data dokumentasi yang diperoleh oleh lembaga-lembaga resmi yang dapat dipercaya kebenarannya, seperti KPUD, PANWASLU, TRUTH, skripsi, jurnal dan data ilmiah lainnya. Begipula data-data dukemntasi yang diperoleh akan diuji dan dan dianalisa kembali untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Untuk menganalisis Kredibilitas/keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*. Metode triangulasi merupakan cara terbaik untukmenghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015. Pilkada ini merupakan pilkada serentak pertama yang diselenggarakan di Indonesia dan yang kedua kalinya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota masuk dalam priode serentak pertama berdasarkan UU No.8 Tahun 2015.

Peserta pilkada Kota Tangerang Selatan diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Airin-Benyamin, Ihsan Mojo-Li Claudia dan Arsyid-Elvier. Airin-Benyamin merupakan pasangan calon petahana yang diusung oleh enam partai koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ihsan Mojo-Li Claudia didukung Oleh Partai Demorot dan Partai Gerindra. Sedangkan Arsid-Elvier didukung oleh partai PDIP dan Partai Hanura (Buku data dan Infografik, Pilkada kota Tansel dalam angka 2015).

Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 54 Kelurahan dan 2245 TPS ini dalam pilkada tercatat 930.483 jumlah pemilih dan hanya 529.106 atau sekitar 56,86 % yang menggunakan hak pilihnya (Buku data dan Infografik, Pilkada kota Tansel dalam angka 2015). Berikut ini data pemilih dan penguna hak pilih pada pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan Tahun 2015.



Gambar 1. Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Kota Tangerang Selatan Pada Pilkada 2015

Sumber : Buku data dan Ifografik ,
Pilkada Tansel dalam angka 2015.

Perolehan suara pada pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan di menangi oleh Pasangan Arin-Benyamin dengan meperolah suara sebanyak 59,62% sedangkan pada posisi kedua ditempatkan oleh pasangan Arsid-Alvier sebesar 32,17% dan pasangan Ihsan Mojo-Li Claudia menduduki posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 8,22%. Berikut ini DPT dan perolehan suara pilkada di Kota Tangerang Selatan Tahun 2015.

Tabel 1. Persentase Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

No.	NAMA PASANGAN CALON	%
1.	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	8,22 %
2.	Drs. Arsyid, M.Si dan dr. Elvier Sudarto Poetri.	32,17 %
3.	Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs Benyamin Davnie.	59,62 %

Dari hasil perolehan suara yang didapatkan oleh keseluruhan kandidat berjumlah 67% dari suara pemilih. Terjadi penurunan 8% dari target KPUD Tangerang Selatan sebesar 75%.

Kekuatan-Kekuatan Politik Yang Digunakan Dalam Pemenangan.

Pada pilkada, dukungan sebagian besar masyarakat kepada calon atau kontestan tidak selalu mutlak karena satu faktor calon tersebut saja namun didukung oleh berbagai faktor kekuatan-kekuatan politik yang turut andil untuk mensukseskan kemenangan. Suatu hal yang menarik adalah maraknya calon petahana yang kembali maju dalam pemilihan dan dipercayakan kembali untuk menduduki kursinya berdasarkan hasil pemilihan, Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu contoh dimana pasangan calon petahana ini kembali maju pada pilkada 2015 dengan mengerakan berbagai kekuatan-kekuatan politik mulai dari parpol, birokrasi media maupun ormas.

Peran kekuatan-kekuatan politik yang dibangun pada saat pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 lalu sangat efektif dalam memenangkan kontestasi politik pada saat itu, dibuktikan dengan ungunya perolehan suara calon petahana Airin-Benyamin hampir disetiap daerah pemilihan. Semua kekuatan politik pada saat itu dikerahkan, mulai dari kekuatan partai politik sebagai partai pengusungnya, birokrasi yang memiliki hubungan emosional yang terbangun ditengah masyarakat lokal, media yang merupakan bagian yang digunakan sebagai bahan propoganda karena begitu cepat diakses oleh semua kalangan, serta kekuatan ormas yang memiliki basis masa sangat kuat. Inilah

merupakan modal awal yang kemudian dikonsepsikan sedemikian rupa secara berkelanjutan agar menarik hati masyarakat untuk memilih pasangan calon petahana Airin-Benyamin.

Peran Partai Politik dalam Pemegang

Partai politik merupakan bagian terpenting dari kekuatan politik yang sangat diperhitungkan pada saat pilkada, parpol yang memiliki basis massa yang kuat karena memiliki pengkaderan dari tingkat atas hingga bawah, membuat setiap calon pada saat pilkada selalu melakukan *bargaining politik* dengan parpol-parpol lain agar dapat diusung pada saat pemilihan.

Pasangan ini merupakan pasangan calon yang paling banyak diusung oleh parpol dibandingkan calon lainnya, hal ini dikarenakan sosok Airin yang berkapabilitas dan dekat dengan rakyat serta komunikasi politik antar parpol yang sudah dibangun sejak pilkada 2010, sehingga pada pilkada 2015 partai politik yang sebelumnya sudah bermitra dengan Airin-Benyamin tinggal dikomunikasikan lebih lanjut.

Keenam partai pengusung Airin yang memiliki kekuatan basis massa kuat yang membantu untuk terjun kemasyarakat untuk mensosialisasikan dan memenangkan pasangan Airin-Benyamin dalam pilkada Tangsel 2015. Koalisi partai ini juga yang membantu dalam perencanaan strategi kemenangan, pemetaan suara dan eksekusi lapangan. Sehingga Parpol pengusung Airin-Benyamin juga merupakan basis kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dalam pilkada Tangsel 2015.

Enam partai poliik pendukung Airin-benyamin merupakan suatu koalisi kuat yang sudah dibangun sejak pilkada tahun 2010 dan pada pilkada 2015 partai - partai tersebut kembali mendukung Airin-Benyamin karena melihat peta politik dan sosok Airin yang masi kuat ditengah-tengah masyarakat, hal ini yang membuat partai-partai politik kembali mendukung Airin-Benyamin pada pilkada 2015.

Tentu tidak hanya karena melihat sosok Airin yang masih kuat tentunya partai politik dalam mendukung satu calon menginginkan feet back dari calon yang diusung untuk kepentingan partai politiknya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tarmizi yang merupakan Ketua DPC PKB Kota Tangerang Selatan bahwahnya setiap partai politik yang

mendukung salah satu calon tentu menginginkan satu feedback dalam hal ini PKB menginginkan agar nantinya dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan kebijakan calon yang diusung bisa sejalan dengan kebijakan dari partai dan tentunya dapat membantu partai untuk meningkatkan elektabilitasnya. Selain itu dengan didukungnya Airin-Benyamin kedepannya diharapkan pasangan calon ini dapat sama-sama bersinergis karena memiliki suatu konsep yaitu membangun Kota Tangerang Selatan yang lebih maju kembali.

Peran Media dalam Pemenangan

Dalam aktivitas politik setiap kandidat mencoba berbagai usaha untuk memperoleh tujuan politiknya. Untuk itu diperlukan sarana Informasi dan Komunikasi. Media sebagai sarana komunikasi dan informasi yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat di masa sekarang. Media massa menurut Amos Davidowitz, mempunyai empat manfaat bagi aktivitas politik suatu partai maupun kandidat yaitu : Information, Service, acces to political power and space (Soesanto, 1980:2).

Media sosial banyak mempengaruhi masyarakat terutama pemilih pemula dalam menentukan pilihanya dalam ajang pilkada, sebagaimana pada pilkada Tangerang Selatan 2015 lalu peran media masa dan media sosial dalam pemenangan Airin-Benyamin sangat berpengaruh. Pasangan Airin-Benyamin banyak dikenal melalui media. Meningkatnya popularitas pasangan Airin-Benyamin selain karena kampanye konvensional yang dilakukan juga karena peran media dalam membangun citra atau *image* sehingga mampu memengaruhi suara publik yang sangat signifikan.

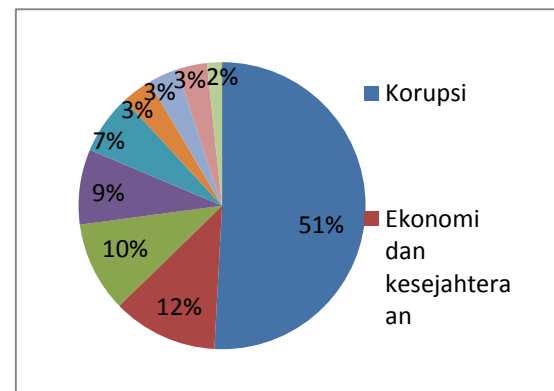
Pasangan petahana ini awalnya dianggap akan kalah dalam dalam pilkada Kota Tangerang Selatan, dikarenakan tingkat elektabilitasnya sempat turun menjadi 37,17%, menurut lembaga Kajian dan Analisa Daerah Terpadu (LKADT). Dikarenakan sandungan kasus korupsi yang dilakukan oleh Tubagus Cairi Wardana yang merupakan suami dari Airin.

Untuk mengejar kemerosotan elektabilitas pasangan ini melakukan sosialisasi sekaligus memperkenalkan programnya ke masyarakat dengan memanfaatkan media, untuk memengaruhi masyarakat serta untuk

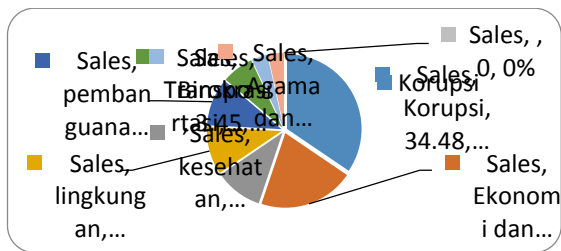
menciptakan opini dan citra positif mengenai pasangan Airin-Benyamin.

Penggunaan media dalam pilkada saat ini tidak hanya digunakan untuk mensosialisasikan visi misi, program dan membangun citra masing-masing pasangan kandidat namun penggunaannya saat ini tidak bisa dipungkiri menjadi mesin propaganda dan penyebaran isu-isu yang sangat efektif untuk dapat memengaruhi opini publik dan menjatuhkan citra politik salah satu pasangan calon. Dalam pilkada Tangerang Selatan 2015 Airin-Benyamin yang merupakan calon Petahana mendapatkan berbagai isu-isu negatif yang menyang, terutama melalui media sosial facebook dan twiter.

Dalam kaitanya dengan kemunculan isu negatif berikut adalah data-data kemunculan isu difacebook dan twiter 27 Agustus 5 Desember 2015. Dimana pada masa itu merupakan masa pencitraan bagi ketiga kandidat politik. Berikut berbagai pemberitaan mengenai isu-isu dan program baik yang secara lansung maupun tidak langsung menyerang Airin-Benyamin di twitwer dan facebook (Maulidina , 2011) :



Gambar 2. Persentasi Kemunculan Isu terhadap Airin Benyamin di Twiter pada 27 Agustus-5 Desember 2015 (Sumber : Syifa Maulidina , 2011. Skripsi Strategi Conter issue Hj.Airin Rachmi Diany,SH. MH dan Drs. Benyamin Danvie dalam Pilkada kota Tangerang Selatan 2015 Di Media Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Penyiaran Islam UIN Syarih Hidayatullah Jakarta)



Gambar 3. Persentasi Kemunculan Isu terhadap Airin Benyamindiafacebook pada 27 Agustus-5 Desember 2015 (Sumber : Syifa Maulidina , 2011. Skripsi Strategi Conter issue Hj.Airin Rachmi Diany,SH. MH dan Drs. Benyamin Danvie dalam Pilkada kota Tangerang Selatan 2015 Di Media Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Peniaran Islam UIN Syarih Hidayatullah Jakarta)

Dari data diatas ditunjukkan bahwa begitu banyak isu yang menyerang Airin dimedia terutama di Twiter dan facebook. Isu yang paling kuat begukir adalah isu korupsi. Kasus korupsi tidak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat Wawan suami Airin di Kota Tangsel tersebut, dilakukan dengan konter isu lapangan dengan berkelilingnya Airin memantau puskesmas-puskesmas dan berkeliling posyandu di sekitaran Tangsel dan Airin juga terjun langsung ke pasar-pasar tradisional untuk melihat perkembangan harga pasar dan menampung aspirasi dari masyarakat kalangan bawah.



Gambar 4. Penggambaran Sosok Kuat dan Tegar Airin (Sumber : Suara Tangsel pos.com, 27 September 2017)



Gambar 5. Penggambaran Sosok Airin yang Peduli dengan Rakyatnya (Sumber : Suara Tangsel pos.com , 28 September 2017)

Dari gambar tersebut dapat digambarkan bahwa conter isu dan strategi politik yang dilakukan adalah dengan menggambarkan sosok Airin yang berkabilitas dan sangat dekat dengan rakyatnya.

Media yang paling banyak digunakan pada saat itu adalah media *facebook dan Twiter* karena media tersebut merupakan media yang paling banyak digunakan dan paling banyak pembahsaan mengenai pilkada Kota Tangerang Selatan 2015. Dan media cetak yang paling banyak digunakan Airin untuk mengonter isu adalah *Suara Tangsel Post*.

Dalam pilkada Kota Tangerang Selatanpun setidaknya ada tiga jenis cara *Stakeholder* memanfaatkan media massa dalam kegiatan pilkada. *Pertama*, menjadikannya sebagai media komunikasi langsung dari pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini media massa dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan calon Airin-Benyamin lebih dekat kepada masyarakat. Contoh, gambar para pasangan calon kepala daerah dipampangkan di Koran dan dimedia Twiter dan Facebook. *Kedua*, media massa dimanfaatkan sebagai sarana propaganda dan sarana informasi khusus. Dalam kasus ini, media massa dimanfaatkan *Stakeholder* untuk memberitakan tentang calon dan membangun citra positif terhadap pasangan calon kepala daerah, hal ini digunakan oleh Airin-Benyamin untuk mengonter isu yang menyerang dirinya. *Ketiga*, memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi pilkada, media penyebar informasi pendidikan untuk pemilih. Informasi ini menyangkut partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan lain- lain.

Kecenderungan memanfaatkan media massa dalam pilkada tidak saja dilakukan para calon atau tim sukses pasangan calon kepala daerah, tapi juga KPU dan Panwas sebagai penyelenggara pilkada. Para *Stakeholder* pilkada ini, selalu menjadikan media massa sebagai salah satu kekuatan terdepan untuk mewujudkan keinginannya.

Peran Birokrasi dan Pemanfaatan Jabatan dalam Pemenangan

Sehubungan dengan pilkada yang tidak dapat dipungkiri akan selalu ada sorotan ataupun gunjingan akan keberadaan birokrasi yang dipresentasikan oleh para Pegawai Negeri Sipil. Sorotan utama adalah tentang netralitas atau keberpihakan para birokrat kepada calon peserta pilkada tertentu. Dalam tataran yuridis formal sebenarnya netralitas PNS dalam pilkada telah diatur seperti dalam PP no 6 tahun 2005 tentang netralitas PNS dalam Pilkada maupun surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang netralitas PNS dalam Pilkada.

Namun bagaimanapun aturan yang ada tersebut tetap ada celah yang dapat dimanfaatkan karena beragamnya motif, model dan bentuk keberpihakan PNS terhadap kontestan pilkada yang ada, antara lain sentimen primordialisme dan logika kekuasaan yang dipengaruhi ketidakpastian sistem dalam penjurusan karir seorang PNS.

Dalam pilkada serentak Tangerang Selatan yang diikuti oleh tiga kandidat calon terdapat ASN/PNS yang tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada. Mereka berpihak kepada petahana dalam hal ini Airin-Benyamin. Padahal ASN/PNS sebagai pegawai pemerintah tidak dibenarkan untuk berpihak/melakukan tindakan-tindakan yang mendukung salah satu calon, terkhusus petahana yang notabnya merupakan atasannya. Kenetralan Birokrasi (PNS) didukung oleh UU No.8 Tahun 2015 ayat 1(b) menyatakan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia.

Berikut indikasi laporan keterlibatan ASN/PNS pada pilkada di kota Tangsel 2015 yaitu antara lain (Putusan MK, 2016) :

1. Pengerahan massa Oleh PNS untuk memenangkan Pasangan Airin-Benyamin.

Pada tanggal 9 September 2015, Lurah pondok karya menundang RT dan RW serta para tokoh masyarakat dikantor Kelurahan Pondok Karya yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi untuk pemengan pasangan calon no urut 3 (Petahana) dengan membagikan buku yang berjudul “Menata Tangsel, Sudah, Sedang dan akan Dilaksanakan” yang pada intinya mengandung kampanye kepemimpinan pasangan calon petahana.

2. Keberpihakan Satpol PP terhadap pasangan Airin-Benyamin pada tanggal 29 November 2015 bertepatan dengan pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon petahana ditemukan keberadaan Satpol PP dengan atribut resmi. Hal ini menandakan terdapat keberpihakan terhadap pasangan calon.

3. Kehadiran Pejabat Dinas dalam kampanye Pasangan Airin-Benyamin.

Pada saat pelaksanaan kampanye yang dilakukan paslon no urut 3, ditemukan banyak Pejabat Dinas Kota Tangerang Selatan yang hadir. Sesuai dengan UU No.8 Tahun 2015 pasal 20 ayat 1 (b) menyatakan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN/PNS. Seharusnya pejabat dinas tidak boleh berpihak kepada salah satu calon hal ini menandakan bahwa Pejabat Dinas Kota Tangerang Selatan telah melakukan pelanggaran yaitu keberpihakan kepada salah satu calon.

keberpihakan PNS terhadap kontestan pilkada yang ada, antara lain sentimen primordialisme dan logika kekuasaan yang di pengaruhi ketidakpastian sistem dalam penjurusan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang.

Kekuatan dominan muncul dari kelompok jawara dan pemilik modal yang memiliki akses politik dengan pusat kekuasaan. Reformasi politik ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap profesional, akan tetapi dalam penjurusan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota.

Sementara mereka kepala daerah

adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oleh sebab itulah kepala daerah terpilih dari partai politik memiliki kekuasaan yang sangat kuat (*powerfull authority*) untuk menarik PNS dalam politik praktis. Pola hubungan *patron-client* serta politik balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah terkooptasi oleh kepentingan politik rezim tingkat lokal. Hal ini menyebabkan hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan.

Tidak mengambil cuti kampanye Petahana dalam pilkada 2015. Dalam putusan MK No.96 Tahun 2016, dikatakan bahwa sesuai dengan pasal 70 ayat (3) huruf b UU no.8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan pasal 61 ayat (2) huruf b PKPU no 7 Tahun 2015 yang berbunyi : “ Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus menjalankan cuti diluar tanggungan Negara.

Dalam hal ini berarti pasangan petahana Airin-Benyamin diwajibkan untuk mengambil cuti kampanye. Masa kampanye 27 Agustus 2015 sampai dengan desember 2015. Petahana baru melakukan cuti 20 September 2015 dan hal itu pula, cuti dilakukan secara bergantian, dimana hal tersebut sama sekali tidak ada dalam peraturan.

Dari hasil wawancara diatas, dapat digambarkan bahwa pasangan petahana Airin-Benyamin telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan cuti kampanye dan memanfaatkan jabatannya.

Jika dianalisa kembali menggunakan teori birorasi bahwanya dari hasil penelitian telah terjadi patologi birokrasi atau penyakit birokrasi dimana calon petahana menggunakan jabatan politiknya untuk memperoleh suara. Calon petahana tidak melakukan cuti kampanye dan melakukan pelanggaran dengan penyelewengan dana hibah yang diberikan kepada beberapa Ormas yang fiktif dan tidak berbadan hukum untuk mendulang suara, selain itu dari teori birokrasi dapat dianalisa bahwanya patologi birokrasi yang kedua adanya rasa sungkan dan pragmatisme beberapa birokrat yang memanfaatkan ajang pilkada untuk menguntungkan dirinya pribadi maupun kelompoknya.

Peran Ormas dalam Pemenangan

Salah satu fenomena yang menarik dicermati adalah peran dan sikap oraganisasi masyarakat (ormas) dalam pelaksanaan pilkada. Ormas seketika memiliki daya pikat yang luar biasa bagi pelaku politik praktis. Bagaimana tidak, ormas-ormas besar tentu memiliki sekian banyak anggota dan berpotensi untuk mendulang dukungan suara bagi pasangan calon kepala daerah. Selain itu, restu dari figur dan tokoh ormas kepada salah satu pihak politisi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa petahana telah melakukan politik uang dengan cara menggunakan anggaran dana hibah melalui APBD Pemerintah kota Tangerang Selatan. Politik uang melalui APBD terlihat dari revisi APBD yang molor, sebagaimana dikatakan oleh perludem. Perpanjangan tersebut menyebabkan pembekakan anggaran APBD Tangsel yang termaksud dalam anggaran terbesar dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Jumlah APBD pertama sebelum revisi sebanyakRp. 29.568.000.000 (Peraturan Walikota No 1 Tahun 2015 tentang APBD Kota Tangerang Selatan) sedangkan setelah direvisi, maka APBD Kota Tangerang Selatan menjadi Rp. 75.696.648. Dalam pembahasan revisi tersebut terjadi cukup alot antara DPRD dan Wali kota Tangerang Selatan. Besarnya jumlah APBD hasil revisi dan alotnya pembahasan dengan DPRD Tangsel dikawatirkan bahwa agar tersebut dapat digunakan sebagai alat kampanye calon petahana sebagaimana

Dengan meningkatnya jumlah dan molornya APBD Tangerang Selatan, diperkuat kembali dengan hasil wawancara dan temuan dari TRUTH bahwa terbukti terdapat penyelewengan dana hibah Tangerang Selatan.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri no 32 Tahun 2011. Pasal 5,6,7 untuk pemberian dana hibah kepada Ormas, harus memiliki SK Kemenkumham dan Sekertariat tetap (TRUTH, 2017). Pembagian dana hibah yang dilakukan di Tangerang Selatan tidak sesuai dengan peraturan karena ditemukan beberapa ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki sekretariat.

Berdasarkan ketentuan persyaratan diatas masih banyak kemasyarakataan atau organisasi masyarakat yang diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

menerima dana hibah Kota Tangsel Tahun 2015. Diantaranya yaitu:

a. Sekretariat tetap: Berdasarkan konfirmasi dengan menandatangani 59 lembaga / organisasi, katagori Organisasi Masyarakat Berbadan hukum di simpulkan bahwa: pertama, 44 memiliki. Kedua, 2 tidak memiliki. Ketiga, 1 tidak terbuka. Keempat, 12 lembaga fiktif.

b. SK Kemenkumham: Berdasarkan konfirmasi dengan menandatangani 59 lembaga/Organisasi, katagori Organisasi masyarakat berbadan Hukum disimpulkan bahwa : Pertama, 6 memiliki. Kedua, 15 tidak memiliki. Ketiga, 26 tidak terbuka. Keempat, 12 lembaga fiktif.

Tabel 2. Data Ormas yang memiliki SK kemenkumham dan sekretariat tetap

Ormas	Surat keputusan	Sekretariat Tetap	Jumlah
59	15	2	17
Fiktif	12	12	24

Sumber: *TRUTH data ormas*

Dari penjelasan data-data diatas dan mengacu pada pembedagri bahwa pasangan petahana Airin-Benyamin telah melakukan pelanggaran dalam hal ini penggunaan dana hibah kepada ormas yang tidak sesuai dengan peraturan. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Ibnu Novit Neang pada tanggal 3 september 2015 kepada Panwaslu Tangsel dan hal tersebut dibenarkan oleh Muhammad Acep yang merupakan divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Panwaslu Tangsel, Selain itu TRUTH juga melaporkan politik uang yang dilakukan oleh timsukses Airin-Benyamin yang terjadi saat kegiatan di Bintaro ada keluarga di daerah Gintung yang diberikan uang 50 ribu untuk mengikuti acara tersebut, sedangkan untuk kampanye teselubung dilakukan dalam beberapa kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat hal dilaporkan oleh TRUTH juga kepada Panwaslu Tangsel namun berdasar klarifikasi dari TRUTH tersebut bahwasanya laporan yang dilakukan tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Tangsel dengan alasan kurang barang bukti pelanggaran.

Dari 27 laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon petahana menurut PANWASLU Kota Tangerang Selatan setelah memeriksa kelengkapan syarat formilnya. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa dari 27 laporan dugaan pelanggaran tersebut 26 di antaranya telah melewati batas masa pelaporan (7) hari, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 134 Ayat (4) yang berbunyi : “ Laporan pelanggaran pemilihan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan pelanggaran pemilihan.

Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3 (Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie), Laporan tersebut diregister dengan nomor 08/LP/PGBW/X/2015 dengan lampiran 1 bundel berisi dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 yang berisi 27 dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi sejak 27 Agustus 2015 sampai 13 Oktober 2015.

Ormas memiliki basis masa yang sudah tidak diragukan lagi hal ini yang sering dijadikan sebagai acuan kekuatan yang dituju oleh pasangan calon yang ingin berlaga dalam pilkada. Airin-Benyamin merupakan pasangan calon petahana yang telah terbukti sukses mengantarkan dirinya kembali ke kursi Walikota dan Wakil Walkota Tangerang Selatan dengan memanfaatkan basis masa ormas. Sebagaimana dipertegas dan diungkapkan oleh Suhardi Timsukses Airin-Benyamin..

KESIMPULAN

1. Strategi politik pemenangan calon petahana Airin-Benyamin pada pilkada Tangerang Selatan 2015 adalah dengan menyusun stategi politik yang konperhensif dan dengan memanfaatkan kekuatan-kekutan politik, mulai dari kekuatan media untuk untuk membungkus citra positif calon, kekuatan birokrasi yang sangat struktural, kekutan ormas dan partai politik yang memiliki basis masa sangat kuat. Kekuatan politik paling dominan terlihat pada kekutan 6 partai pengusung yang membentuk timpemenanganan PerTPS dan kekuatan Ormas yang memiliki basis masa disetiap wilayah.

2. Faktor pendukung lain dalam kemenangan strategi politik Airin-Benyamin adalah dengan menggunakan kekuatan politik relawan 4 pilar, 4 Pilar yang terdiri dari Jaringan Lama (Jarla), Relawan Banten Bersatu (RBB), Aiqosiah (Ibu-Ibu Pengajian), Tingat Kepemudaan. Kekuatan ini merupakan kekuatan timsukses dari Ratu Atut Causia yang merupakan ipar Airin yang terus dirawat. Selain itu masi kuatnya sosok Airin-Benyamin yang merupakan calon petahana yang sudah lebih dikenal dikalangan masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam kemenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid S. Soesanto.1980. Komunikasi sosial di Indonesia, Jakarta:Bina Cipta.
- Dr. Asrinaldi M,Si. 2014. Kekuatan Politik Indonesia. Padang: Tiara Wacana
- Budi Suryadi.2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. IRCiSo, Yogyakarta
- Fahmid Imam Mujahidi, *Identitas Dalam Kekuasaan* ,2012, Makassars: Innawa
- Indra purbono Ishak, 2010. *Peta Kekuatan Politik pemilihan kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010* . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Maulidina Syifa . 2011. *Strategi Conter issue Hj.Airin Rachmi Diany,SH. MH dan Drs. Benyamin Danvie dalam Pilkada kota Tangerang Selatan 2015 Di Media Sosial*, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Penyiaran Islam UIN Syarih Hidayatullah jakarta.
- Putusan MK, no 107/PHP.KOT-XIV/2016.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV.Alfabeta:Bandung
- Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*.Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- www.kpk.go.id, diakses pada 27 februari 2018
- Joniansyah Haryono, “ Isu Korupsi Gerus Elektabilitas Airin tapi tetap teratas “, diakses oleh haji.tempo.com pada 8 juni 2017 pukul 23;42 WIB.
- [Tangsel pos.com](http://Tangsel.pos.com) , 27 September 2017 dan 28 September 2017.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151210_indonesia_pilkada_petahana diakses pada 27 februari 2018
- <http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=Dashboard/paslon&tahap=3> diakses pada 27 februari 2018
- <http://www.beritasatu.com/aktual/344756-632-petahana-menangi-pilkada.html> diakses pada 24 november 2016.
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1504-wawan-tersangka-kasus-alkes> diakses 27 februari 2018